

BAB II

DESKRIPSI PERKEMBANGAN DAN AKTOR-AKTOR

REDD

A. Tahap Perkembangan REDD

Deforestation dan emisi menjadi perdebatan politik dan ilmiah telah berlangsung sejak awal UNFCCC namun keseriusan untuk menjadikan isu ini sebagai salah satu isu penting adalah pada kesepakatan Protokol Kyoto pada tahun 1997. Namun dalam protokol ini hanya disepakati tentang perlunya melindungi dan mengkonservasi tempat penyimpanan karbon termasuk hutan. Protokol ini juga berisikan tentang target penurunan wajib emisi dari negara-negara industri maju dan juga memuat Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism/CDM*), yang memungkinkan negara-negara tersebut mendapatkan kredit karbon di negara-negara berkembang jika mereka gagal dalam penurunan emisi. Namun dalam Protokol ini belum ada kesepakatan mengenai pemberian kompensasi terhadap negara-negara berkembang yang mampu menekan *deforestation* di negaranya, walaupun demikian Protokol ini menjadi pijakan awal dari kesepakatan tentang perlunya penyelamatan hutan.

Usul memberikan insentif positif bagi negara-negara pemilik hutan yang mampu mengurangi dampak *deforestation* baru muncul ketika Koalisi Pemilik Hutan Tropis (*Coalition for Rain Forest Nations/CfRFN*) yang dipelopori oleh Papua Nuginia dan Costarica sepakat mengajukan proposal tentang insentif untuk *avoided*

deforestation yang kemudian masuk dalam agenda CoP ke 11 di Montreal dengan nama *Reducing Emission From Deforestation in Developing Countries* dengan menggunakan pendekatan emisi nasional, hampir sama dengan Papua Nuginia dan Costa Rica, Brasil pun memberikan usul agar adanya kompensasi bagi negara yang mampu mencegah deforestasi.

Proposal ini banyak disambut baik oleh negara-negara para pihak, terutama karena adanya fokus baru, yang memecahkan berbagai permasalahan dari diskusi mengenai isu “penghindaran *deforestation*” yang ada sebelumnya yang lebih berfokus pada tingkatan proyek atau pendekatan sub-nasional. CoP merujuk isu tersebut kepada Badan Tambahan untuk Masukan Ilmiah dan Teknis (*Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice/SBSTA*), yang telah banyak menerima usulan dan mengadakan dua lokakarya (FCCC/SBSTA/2006/10 dan FCCC/SBSTA/2007/3), namun sampai pada Cop ke 12 di Nairobi, Kenya, negara-negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto gagal mendesak negara-negara maju untuk mengurangi emisinya sesuai dengan target yang ditentukan. Pada CoP ke 12 ini dapat dikatakan tidak ada sebuah kemajuan. Namun kesimpulan yang diperoleh SBSTA menjadi sesuatu yang penting bagi perkembangan pencegahan *deforestation*. Temuan tersebut disampaikan oleh ketua SBSTA pada CoP ke 13 di Bali.

Pada UNFCCC CoP ke 13 yang berlangsung pada Desember 2007 di Bali, Indonesia selaku tuan rumah penyelenggaraan dan didorong oleh kesadaran sebagai negara pemilik hutan terbesar ke 3 di dunia dan juga nomor 2 sebagai negara penghasil emisi karbon dari proses *deforestasi* mengusulkan sebuah mekanisme baru mengenai pengurangan dampak pemanasan global melalui pencegahan Deforestasi.

Berbeda dengan apa yang diusulkan oleh Papua Nuginia dan Costarica pada CoP ke 11 di Montral. Dalam usulannya Indonesia menambahkan lagi poin tentang pencegahan *degradation* maka program yang diusulkan oleh Indonesia disebut dengan *Reducing Emission from Deforestation and Degradation*. REDD ini berhasil menjadi salah satu program yang disepakati dalam CoP ke 13 yang kesepakatan tersebut tertuang dalam *Bali Road Map*.

Sebelum CoP ke-13 Indonesia memang telah mempersiapkan Program ini, departemen kehutanan melalui kordinasi *Indonesia Forest Climate Alliance* (IFCA) telah menetapkan Road Map *Reducing Emission from Deforestation and Degradation in Indonesia* (REDDI). Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi merupakan iniatif internasional kedalam konteks nasional. Oleh karenanya REDDI tidak dirancang eksklusif terhadap kebijakan kehutanan, tetapi untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menuju pembangunan hutan yang berkelanjutan.

Berikut adalah tahapan program REDD yang telah disusun oleh Departemen Kehutanan melalui kordinasinya dalam *Indonesia Forest Climate Alliance* (IFCA):

1. Fase Persiapan (Pre-CoP 13)

Pada fase ini kegiatan difokuskan pada persiapan basis negosiasi di CoP-13 dan penyiapan desain serta kriteria pemilihan lokasi sebagai *pilot sites*. Studi komprehensif yang mencakup metodologi dan strategi serta kajian strategi serta kajian aspek pasar dan insentif, dilakukan selama bulan Juli-November 2007. Studi dilakukan oleh tenaga ahli internasional dan nasional, dengan narasumber dari instansi/organisasi terkait atau perorangan sesuai keahliannya. Pembiayaan didukung

oleh World Bank, Inggris, Jerman dan Australia. Hasil dipresentasikan pada *site events* CoP ke-13.

2. Fase Transisi (2008-2012)

Pada tahap transisi, pelaksanaan *Pilot activities*, dimaksudkan sebagai sarana *learning by doing process*, termasuk didalamnya testing metodologi dan strategi yang dihasilkan dari studi bulan Juli-November 2007, termasuk mekanisme insentif. *pilot activities* dapat berupa pengurangan emisi dari deforestasi, pengurangan emisi dari degradasi dan konservasi

3. Fase Implementasi (mulai 2012 atau lebih awal tergantung pada perkembangan dalam negosiasi CoP)

Fase ini merupakan implementasi mekanisme REDD dengan *modalities, rules*, dan prosedur sesuai keputusan CoP

Reducing Emission from Deforestation and Degradation dalam Bali RoadMap

Dalam UNFCCC CoP ke 13 di Bali memang sudah disepakati tentang program REDD namun REDD yang tertuang dalam *Bali RoadMap* masih sekedar butir kesepakatan yang belum dapat dilaksanakan dan perlu pengkajian lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme penerapan program ini. Berikut ini adalah bentuk REDD dalam Bali Roadmap :

- REDD merupakan mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk member insentif yang positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan

- REDD merupakan mekanisme internasional yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan tetap menghormati kedaulatan negara (*sovereignty*)
- Negara maju sepakat memberikan dukungan untuk *capacity building*, transfer teknologi dibidang metodologi dan institusional, *pilot/demonstration activities*,
- Untuk melaksanakan *pilot/demonstration activities* dan implementasikan REDD, diperlukan penguasaan aspek metodologi sesuai standar internasional. Oleh karenanya CoP 13 menyepakati *indicative guidance* untuk *pilot/demonstration activities*, dimana terdapat tanggung jawab internasional, nasional (pemerintah), dan sub-nasional (pelaksana daerah).

Indicative guidance untuk *pilot/demonstration activities* yang disepakati dalam CoP Ke-13 adalah sebagai berikut :

- Demonstration activities harus mendapat persetujuan *host party* dalam hal ini pemerintah.
- Penghitungan pengurangan/peningkatan emisi harus sesuai hasil terukur, transparan, dapat diverifikasi dan konsisten sepanjang waktu.
- Pelaporan penggunaan *reporting guidelines (Good Practice Guidance for Land, land-use Change and Forestry)* sebagai dasar penghitungan dan monitoring emisi.
- Pengurangan emisi dari *national demonstration activities* dievaluasi berdasarkan emisi deforestasi dan degradasi nasional.

➤ *Subnational demonstration activities* dievaluasi dalam batas kegiatan tersebut, termasuk evaluasi terhadap pengalihan emisi sebagai dampak dari kegiatan yang dimaksud (*leakage*).

➤ *Pengurangan/peningkatan emisi* dari *demonstration activity* didasarkan pada emisi masa lalu, dengan memperhatikan kondisi masing-masing negara.

➤ Pemakaian pendekatan sub-nasional harus merupakan suatu langkah menuju pendekatan *national reference levels/baseline* dan estimasi pengurangan emisi,

➤ *Demonstration activities* harus konsisten dengan provisi di bawah UNFF, CDD, dan CBD.

➤ Pengalaman dari implementasi *demonstration activities* dilaporkan dan tersedia melalui *web platform*.

➤ Termasuk dalam pelaporan *demonstration activities* adalah deskripsi kegiatan, efektifitas, dan informasi lain yang relevan.

➤ Dianjurkan menggunakan *Independent expert review*.

Sampai saat ini REDD masih dalam pembahasan, negoisasi akan dilakukan Adhoc Working on Long Term Cooperatif Action (AWG-LCA) atau Kelompok Kerja untuk Aksi Kerjasama Jangka Panjang. Keputusan akhir mengenai REDD akan di ambil pada CoP 15 tahun 2009.

B. Aktor-aktor dibalik Reducing Emission From Deforestation and Degradation pada UNFCCC ke 13 di Bali

Pada kenyataannya bahwa dalam REDD ini terdapat banyak aktor yang berperan dalam pengusulan serta sampai pada tahap di setujuinya REDD dan menjadi salah satu butir kesepakatan yang tercantum dalam Bali Action Plan. Namun bukan dalam maksud untuk mengurangi peran dari aktor-aktor yang lain tetapi dalam laporan penelitian ini menekankan pada aktor-aktor yang dianggap mempunyai porsi besar dalam pengusulan ide REDD ini dikarenakan besarnya kepentingan mereka terhadap REDD tersebut. Berikut adalah aktor-aktor dalam Pengusulan REDD:

1. Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations)

Program REDD seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa REDD ini dilahirkan pada UNFCCC CoP ke 13 di Bali hal ini secara langsung menjelaskan bagaimana peran dari Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai organisasi yang menaungi penyelenggaraan konfrensi perubahan iklim. Namun tentu saja peran Perserikatan Bangsa-bangsa ini tak sederhana itu saja tetapi perannya juga sangat penting dalam penentuan kesepakatan yang lahir dari konfrensi perubahan iklim tersebut.

Pada juli 2008, PBB melahirkan UN-REDD (*United Nations Collaborative Programme on Reducing Emission from Deforestation and Degradation in developing countries*). Program tersebut dipimpin oleh UNDP, FAO, dan UNEP untuk mengarahkan kegiatan persiapan (Rediness activities) untuk REDD.

Maksud dari UN-REDD ini adalah membantu negara-negara berkembang yang memiliki hutan dan komunitas internasional untuk memperoleh pengalaman dengan beragam formula pengelohan dan struktur pembayaran. Dengan tujuan

menghasilkan arus transfer sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi global dari deforestasi dan degradasi hutan secara signifikan. Namun tujuan utamanya adalah menyalurkan dana dari negara-negara maju untuk diberikan kepada negara-negara pemilik hutan.

UN-REDD akan meliputi peningkatan kapasitas (*capacity building*), pengembangan strategi, menguji sistem keuangan dan pengaturan institusi untuk pengawasan dan verifikasi. Program UN-REDD mendukung ketersangkutan REDD dengan pasar karbon dan akan memadukan inisiatif internasional lain seperti FCPF, FIP dan GEF. Program UN-REDD berkomitmen melakukan pendekatan berdasarkan hak asasi manusia (*rights based*) dan dalam dokumentasinya menyebutkan *Free, Prior and Informed Consent*¹⁷.

Selanjutnya peran Perserikatan Bangsa-bangsa dalam persoalan REDD ini hanya lebih memfokuskan pada program UN-REDD saja sehingga dirasakan kurang memiliki peran yang besar dalam pengembangan konsep REDD, kalah dibandingkan aktor-aktor lainnya. Mungkin ini disebabkan PBB harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan karena PBB harus mampu memberikan kebijakan yang mampu mengakomodir semua kepentingan negara-negara di dunia.

¹⁷ *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* dapat diartikan menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan menyatakan setuju atau menolak, atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam tanah mereka.

2. Bank Dunia.

Keterlibatan Bank Dunia terhadap REDD diawali saat mendanai *Indonesian Forest Climate Alliance* (IFCA). Aliansi ini merupakan suatu forum komunikasi, koordinasi, dan konsultasi bagi sekelompok ahli yang bergerak di bidang kehutanan dan perubahan iklim di Indonesia, terutama untuk menganalisa praktek skema REDD di Indonesia. IFCA beranggotakan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga-lembaga saintifik dan mitra internasional yang dikoordinatori oleh Departemen Kehutanan. Keterlibatan Bank Dunia pada IFCA ini adalah untuk dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah Australia, Jerman dan Inggris.

IFCA inilah yang merumuskan program apa yang nantinya akan di tawarkan oleh pemerintah Indonesia pada CoP ke 13 di Bali. IFCA merumuskan kebijakan yang terkait dengan (i) penentuan tingkat emisi (ii) strategi penggunaan lahan (iii) pemantauan (iv) mekanisme keuangan (V) pembagian keuntungan dan tanggung jawab dalam pencegahan pemanasan global. Hasil dari penelitian IFCA yang disampaikan Pemerintah Indonesia pada CoP ke 13 ini salah satunya ada usulan tentang Program REDD. Dengan kata lain pemerintah Indonesia merupakan negara pengusul REDD.

Keterlibatan Bank Dunia sebenarnya banyak mendapat kritik dari negara-negara berkembang G77 terutama mengenai pendanaan dan pembiayaan multilateral skema REDD, negara-negara G77 menghendaki bahwa pembiayaan REDD harus dibawah kekuasaan UNFCCC. The Global Environmental Facility (GEF) diusulkan oleh G77 sebagai badan pembiayaan resmi yang diakui UNFCCC. Namun GEF belakangan juga dikritik karena ternyata Bank Dunia memainkan peran yang cukup

besar, padahal Bank Dunia hanya salah satu aparat pelaksana GEF (yang lain adalah UNDP dan UNEP), ia mempunyai pengaruh yang besar mengenai pembagian dana GEF. Dan yang menjadi kritik lagi juga mengenai Prosedur GEF dalam pemilihan sangat menguntungkan negara donor besar diatas yang lain. GEF sendiri juga di duga ingin memajukan proyek konservasi besar yang eksklusif di Asia dan Afrika.

Ditengah kontroversi tersebut selain keterkaitannya dengan pendanaan IFCA, Bank Dunia juga memperkuat lagi posisinya dalam CoP ke 13 dengan mengumumkan Program fasilitas kemitraan karbon hutan baru yaitu *The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)*¹⁸. FCPF ini merupakan sistem insentif skala besar untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan menyediakan sumber-sumber dana segar untuk pemanfaatan yang lestari atas sumberdaya hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, bagi lebih dari 1,2milyar penduduk yang hidupnya sedikit banyak tergantung terhadap hutan.

FCPF terdiri dari dua skema - Mekanisme Kesiapan (Readiness Mechanism), untuk membantu negara berkembang untuk siap berpartisipasi dalam program insentif REDD, dan Mekanisme Pendanaan Karbon (Carbon Finance Mechanism), yang menjadi percontohan pembayaran karbon bagi sekitar lima peserta Mekanisme Kesiapan yang berhasil. Setiap mekanisme memiliki dana perwalian (*trust fund*) sendiri, dengan Bank bertindak sebagai pengawas bagi keduanya. Intinya FCPF ini mendorong agar pendanaan REDD ini menggunakan pendekatan pasar. Dibuktikan

¹⁸ Sampai saat penelitian ini berlangsung tercatat ada 37 negara yang akan menerima bantuan dari program FCPF.

dengan banyaknya *concept notes* tidak memperhatikan hak milik tanah dan hak adat¹⁹.

Selanjutnya pada pasca CoP 13 bulan Mei 2008 Bank Dunia kembali meluncurkan lagi sebuah rogram baru yang merupakan program pendamping dari FCPF yang dinamai *Forest Investment Program (FIP)*. Jika FCPF adalah program Bank dunia untuk mendukung kegiatan persiapan (*Readliness Activities*) serta mekanisme pembayaran pilot program sedangkan FIP sendiri diluncurkan oleh Bank Dunia untuk memberikan dana pinjaman untuk pelaksanaan reformasi dan perencanaan yang dibutuhkan dilapangan.

Melalui FIP inilah Bank Dunia mendorong agar para Pemerintah yang hendak mengikuti REDD menyiapkan segala bentuk perundangan-undangan serta membentuk tim yang nantinya mengurus pelaksanaan REDD. Melalui kedua program inilah Bank Dunia mencoba mengambil perannya dalam perdagangan Karbon dunia melalui program REDD.

Dalam kaitannya dengan kerjasama Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia sendiri, Bank Dunia saat ini lebih banyak melalui pendekatannya dengan Program FCPF. Pendekatan ini berfokus pada reformasi generasi baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia serta integrasinya ke perekonomian dunia sambil memenuhi pertumbuhan kebutuhan atas pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini Bank Dunia membantu Indonesia dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

¹⁹ WALHI, Tim Mann, Muhamad Teguh Surya, *REDD Wrong Path : Pathetic Ecobusiness*, Jakarta : Walhi, 2009.

Lebih spesifiknya Bank Dunia Di Indonesia dalam kaitannya dengan REDD melakukan tindakan-tindakan seperti :

- a. Membantu Departemen Kehutanan dalam mempersiapkan Prakarsa REDD dengan Aliansi Iklim Kehutanan Indonesia (LSM dan universitas) dengan pembiayaan bersama dari DFID, AUSAID dan GTZ.
- b. Mendukung prakarsa Indonesia dalam dialog global mengenai perdagangan dan perubahan iklim membangun kapasitas Departemen Perdagangan mengenai aspek hukum perdagangan dan perubahan iklim, serta melakukan studi mengenai bagaimana Indonesia bisa mendapat manfaat dari liberalisasi perdagangan dalam produk ramah lingkungan.
- c. Mendukung pengembangan proyek uji coba potensial melalui prakarsa konservasi hutan termasuk Aceh Forest Environment Project (dengan dukungan MDF) dan Birdlife Rehabilitation Project dengan kemungkinan mendapatkan manfaat perdagangan karbon
- d. Mempermudah pertimbangan Indonesia mengenai peluang Pembiayaan Iklim yang diwakili oleh Climate Investment Fund dan berbagai Carbon Partnership Funds termasuk juga FCPF melalui keterlibatan dalam proses konsultasi.²⁰

²⁰Makalah Seminar Infid, *Indonesia, Bank Dunia dan Perubahan Iklim*, http://www.RTD1-Bank_Dunia_ClimateChange_Summary.PDF

Kepentingan Bank Dunia Dalam REDD

Tentunya bahwa keterlibatan Bank Dunia dalam REDD ini bukan tanpa motif atau kepentingan Bank Dunia terhadap kesuksesan REDD ini. Untuk lebih memahami apa yang menyebabkan Bank Dunia aktif berperan dalam REDD ini maka perlu di kemukakan apa yg menjadi kepentingannya. Berikut temuan motif kepentingan Bank Dunia Dalam REDD:

1. Kepentingan yang paling utama adalah mengembalikan posisi Bank Dunia sebagai pemain utama ekonomi global yang selama ini semenjak terjadinya krisis keuangan global, Bank Dunia semakin ditinggalkan maka oleh karena itu Bank Dunia aktif mendorong mekanisme REDD ini melalui Pasar bebas sehingga Bank Dunia berharap bisa menjadi Broker dalam perdagangan karbon. Melalui FCPF dan FIP ini Bank Dunia mendorong agar skema REDD ini di jalankan melalui proses pasar atau dengan kata lain Bank Dunia mendorong nanti program REDD ini bisa menjadi suatu program liberalisasi perdagangan karbon. Liberalisasi REDD direncanakan akan menempatkan REDD sebagai Makelar/Broker perdagangan karbon sehingga setiap aliran uang yang dipergunakan untuk membeli karbon REDD oleh negara-negara yang gagal menurunkan tingkat emisi nasionalnya harus melewati Bank Dunia terlebih dahulu sebelum ke negara pemilik hutan. penting untuk melihat bukti bahwa Bank Dunia memiliki kecenderungan melakukan pendekatan berdasarkan pasar. Walaupun hal ini tidak disebutkan secara jelas dalam FCPF, tetapi ini jelas merupakan tujuan kunci FCPF.

2. Ada kecurigaan bahwa Bank Dunia aktif dalam REDD ini adalah untuk menutupi dosanya terhadap kerusakan hutan atau dengan kata lain Bank Dunia memainkan Politik Cuci Tangan. Kecurigaan ini berdasarkan pada catatan sejarah mengenai kebijakan-kebijakan Bank Dunia yang membawa dampak kerusakan hutan di berbagai negara. Salah satu yang dicatat adalah bagaimana Bank Dunia pada tahun 1982-1985 di Brazil Bank Dunia memberikan dukungan kepada proyek pemindahan penduduk besar-besaran atas nama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang lebih dikenal sebagai proyek *Polonoroeste*. Dukungan keuangan pada proyek ini telah menghasilkan sebuah bencana ekologi yang dahsyat, bahkan Bank Dunia juga mengakui hal itu

Akibatnya, kawasan hutan di daerah itu mengalami degradasi yang cukup parah. Pada 1982 penggundulan hutan telah mencapai 4 persen dan pada 1985 meningkat menjadi 11 persen. Sementara itu, pada 1987 hampir seluruh hutan di kawasan itu telah lenyap. Bahkan pada tahun yang sama sebuah gambar citra satelit menunjukkan terdapat 6.000 titik api pembakaran untuk membuka hutan dari seluruh kawasan hutan Amazon. Dan hal ini juga dilakukan di Indonesia, lembaga ini merupakan pihak yang pertama kali terlibat dalam proyek transmigrasi di Indonesia pada 1974. Sama seperti proyek

Polonoroeste, proyek ini juga menimbulkan kerusakan dan penggundulan hutan besar-besaran²¹.

Pulau Sulawesi dan Sumatera adalah kawasan yang paling parah menderita kerugian ekologi akibat proyek ini. Di Sumatera, sekitar 2,3 juta hektare tanah yang semula merupakan hutan hujan alam telah menjadi lahan kritis. Adapun di Sulawesi, 30 persen wilayah hutan yang terkena proyek transmigrasi ini berubah menjadi lahan kritis. Oleh sebab itu Bank Dunia merasa perlu berperan dalam REDD ini agar mereka dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerusakan hutan yang mereka ikut ambil bagian dalamnya.

Sebenarnya peran Bank Dunia dalam penanggulangan dan pencegahan perubahan iklim diragukan keseriusannya sebab sampai dengan saat ini Bank Dunia tetap melakukan pembiayaan terhadap proyek investasi minyak bumi bahkan kuota dana yang diberikan bagi investasi minyak bumi ini sangat besar dibandingkan dengan dana yang disiapkan Bank Dunia bagi pencegahan pemanasan global.

3. Keterlibatan Bank Dunia dalam REDD juga demi mengamankan kepentingan dari negara-negara maju yang merupakan penyumbang dana bagi mereka. Bahwa dalam setiap konferensi perubahan iklim selalu yang menjadi terangka penyebab pemanasan global adalah negara-negara maju. Untuk itu Bank Dunia yang merupakan perpanjangan tangan dari negara-negara maju hendak

²¹ http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8961&coid=1&caid=56&gid=4 dikutip dari Graham Hancock *Lord of Property: The Power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business*, 1989

mengamankan posisi mereka agar tidak merugikan negara-negara donornya tersebut.

2. Negara-Negara ANNEX-1

Negara-negara industri maju atau yang biasa disebut Annex-1 dalam konferensi perubahan iklim merupakan salah satu aktor penting dan memiliki peran yang besar dalam setiap konferensi perubahan iklim (COP), bahkan keputusan mereka sangat mempengaruhi efektif tidaknya kesepakatan yang telah dicapai pada COP tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa negara-negara Annex-1 merupakan penyumbang terbesar emisi karbon ke atmosfer yang merupakan penyebab utama perubahan iklim sehingga dukungan atau tindakan negara-negara Annex-1 inilah yang menjadi kunci penanganan perubahan iklim.

Pada setiap penyelenggaraan Cop berlangsung selalu yang menjadi sorotan utama dari negara-negara Annex-1 ini adalah permasalahan tingkat emisi. Ada tuntutan dari negara-negara non Annex 1 agar negara-negara Annex-1 memiliki komitmen jelas dalam hal penurunan tingkat emisi karbonnya. Tuntutan keseriusan negara Annex-1 untuk mengurangi tingkat emisinya diawali pada tahun 1994 melalui usulan AOSIS yang mengusulkan negara-negara Annex-1 menurunkan emisi karbonnya sebesar 20% pada tahun 2005. Usulan ini kemudian dikenal dengan target Toronto dan dilanjutkan kembali oleh usulan Jerman pada tahun 1996 yang juga belakangan disepakati oleh Uni Eropa bahwa penurunan Emisi Annex-1 sebesar 7,5 persen pada tahun 2005 dan 15 persen pada tahun 2010 dengan menggunakan tahun 1990 sebagai tahun awal. Dan baru pada tahun 1997 ditegaskan bahwa negara Annex-

1 paling sedikit 5% menurunkan tingkat emisi karbonnya disbanding tahun 1990 pada periode tahun 2008-2012.

Isu penurunan tingkat emisi ini sangat sensitive bagi negara Annex-1 dikarenakan penurunan tingkat emisi ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara. Menurunkan emisi tidaklah mudah dan murah. Hal ini berkaitan erat dengan pengembangan teknologi yang membutuhkan banyak dana untuk menciptakan pembangkit energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Bagi negara-negara Annex 1 menurunkan emisi karbon berarti dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi mereka, ini berkaitan dengan penggunaan pembangkit listrik yang kebanyakan digunakan oleh negara maju adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan peningkatan emisi karbon dan pemakaian pembangkit listrik berbahan bakar fosil bukan tanpa alasan sebab pembangkit listrik ini memang murah.

Industri di negara-negara Annex 1 sangat menikmati penggunaan energi murah ini sebab hal ini dapat memotong biaya biaya produksi. Tentunya jika harus menggunakan pembangkit energi dengan bahan bakar terbarukan membutuhkan investasi lebih pada pengembangan mesin-mesin pembangkit listriknya dan yang lebih memberatkan lagi bahwa bahan bakar fosil lebih murah dari pada bahan bakar dari *biofuel*.

Sikap pemerintah negara-negara Annex 1 yang sangat berhati-hati bahkan negara seperti Amerika Serikat secara terang-terangan menolak kesepakatan untuk melakukan penurunan emisi karbon. Hal ini didorong oleh adanya tekanan dari pihak-pihak industri di negara-negara tersebut yang tidak menginginkan adanya pembatasan

buangan emisi karbon sebab menurut mereka bahwa jika mengganti mesin-mesin industri baru yang lebih ramah lingkungan akan membutuhkan dana yang besar sebab mesin dengan teknologi ramah lingkungan relative lebih mahal.

Namun seiring dengan waktu belakangan negara-negara Annex 1 mulai mau kooperatif dengan menetapkan target penurunan emisi karbonnya. Ini setelah makin gencarnya media melakukan pemberitaan bagaimana dampak buruk dari pemanasan global²². Hal ini ikut mendorong masyarakat di negara-negara maju tersebut sadar akan perlunya pengurangan emisi karbon selain karena mereka juga sudah mulai merasakan pemanasan global. Masyarakat negara-negara maju tersebut yang tadinya merasa hidupnya nyaman sekarang mulai terganggu melakukan protes pada pemerintahnya mendesak agar pemerintahnya ikut dalam pencegahan pemanasan global²³.

Namun dengan adanya protes dari masyarakatnya bukan serta-merta pemerintahan negara-negara maju mau menurunkan secara signifikan menyetujui untuk menetapkan target penurunan tingkat emisi karbonnya, ini terjadi karena besarnya pengaruh tekanan dari perusahaan-perusahaan besar yang menolak adanya penurunan emisi. Bisa di maklumi bagaimana kuatnya pengaruh lobi-lobi perusahaan besar ini di pemerintahan berkorelasi dengan sistem ekonomi mereka yang kapitalistis liberalis yang mengharuskan negara menciptakan situasi yang mendukung

²² Salah satu publikasi media yang paling berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat mengenai pemanasan global adalah film dokumenter karya Al Gore (mantan Wakil Presiden Amerika Serikat era Clinton) yang berjudul *An Inconvenient Truth* tentang perubahan iklim khususnya yang diakibatkan pemanasan global. Bahkan film ini mendapatkan penghargaan Academy Award sebagai film dokumenter terbaik tahun 2007.

²³ Salah satu protes besar yang dilakukan warga di kota-kota besar di dunia termasuk London, Sydney, dan juga Montreal yang menuntut pemerintahnya masing-masing ikut dalam pencegahan pemanasan global dengan cara menurunkan emisi karbonnya. (Harian Kompas, Senin, Tanggal 5 Desember 2005)

dunia usaha dan juga sebab sebagian besar Senator di negara-negara maju adalah pemimpin dari perusahaan-perusahaan besar tersebut²⁴.

Walaupun perusahaan-perusahaan besar tersebut mampu menguasai pemikiran pemerintahannya tapi hal tersebut tidak berlaku bagi semua masyarakat. Masyarakat negara-negara maju tetap terus menekan dengan melakukan protes-protes di jalan. Tentu hal ini tak bisa dibiarkan terus oleh pemerintahnya karena akan berdampak pada ketidak stabilan politik di negaranya. Maka pemerintah negara-negara maju tersebut mencari alternative cara agar dapat menyelesaikan masalah ini.

Pada akhirnya pemerintah negara-negara maju menyetujui penetapan target pengurangan emisi karbonnya, namun untuk dapat menyenangkan para pengusaha-pengusaha besar tersebut mereka merancang sebuah sistem yang dapat menghindarkan mereka dari penurunan emisi karbon secara signifikan di negaranya dengan cara memberikan alternative pembelian karbon yang diusulkan pada UNFCCC. Melalui cara ini negara maju akan memberikan kompensasi terhadap negara berkembang yang memiliki cadangan karbon dari hutannya jika negara maju tersebut tidak mampu mengurangi emisi karbon sesuai dengan target yang ia sepakati. mekanisme inilah yang disebut dengan mekanisme fleksibel²⁵.

²⁴ Bukti kuatnya lobi-lobi perusahaan besar terhadap kebijakan pemerintah negara-negara maju dalam menolak target penurunan emisi karbon dapat terlihat jelas dari terbentuknya Global Climate Coalition yang terdiri dari koalisi perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang eksplorasi minyak dan otomotif, yaitu Exxon Mobil Corporation, Ford Motor Company, Royal Dutch Shell, Texaco, British Petroleum, General Motors, dan Daimler Chrysler. Kelompok ini terbentuk sebagai respon terhadap laporan-laporan ilmiah yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change. Koalisi ini menolak bahwa adanya anggapan bahwa pemanasan global akibat emisi karbon melainkan Karena hal yang alamiah. Koalisi ini mampu meyakinkan pemerintah Amerika Serikat untuk menolak meratifikasi Protokol Kyoto yang salah satu butir kesepakannya adalah menetapkan target penurunan emisi. Inilah yang disebut dengan *Small Group Theory* bahwa perilaku politik luar negeri suatu negara ditentukan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki akses tertentu terhadap sumber daya tertentu.

²⁵ Daniel Murdiyarto, *op.cit*, hal 47.

Sejalan dengan waktu mekanisme itu terus berkembang menjadi *Clean Development Mechanism (CDM)* yaitu negara maju dapat melakukan investasi konservasi di negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisinya yang dananya diperoleh dari hasil penghimpunan denda atas ketiik taatan negara maju terhadap komitmennya dalam menurunkan emisi karbonnya. Negara maju harus membeli sejumlah karbon sesuai dengan kelebihan jatah emisi karbon yang ditargetkan.

Selanjutnya mekanisme CDM ini akan berakhir pada tahun 2012 sesuai dengan berakhirnya masa berlakunya Protokol Kyoto maka dunia sepakat membuat mekanisme baru lagi yang nantinya akan menggantikan program CDM, melalui CoP ke 13 lah dimunculkan kembali mekanisme baru yang sebenarnya hampir mirip dengan program CDM yaitu yang kita kenal dengan REDD sekarang ini. Jadi dengan kata lain sebenarnya program REDD ini merupakan ide dari negara maju yang ingin menghindar dari tanggung jawabnya untuk menurunkan emisi karbonnya. Jelas pula apa yang menjadi kepentingan dari negara-negara maju terhadap program REDD ini adalah untuk melindungi serta menyelamatkan ekonomi dari perusahaan-perusahaan besar miliknya agar tetap beroperasi seperti biasanya.

Dari pandangan negara-negara maju REDD ini bisa dibaca sebenarnya hanya dijadikan sebagai isu pengalihan saja agar perhatian dunia tidak terfokus pada isu pengurangan emisi karbon hasil produksi industry negara-negara maju²⁶. Negara-negara maju jelas tidak mau di beri label penyebab satu-satunya yang bertanggung

²⁶ Hal ini terungkap dalam Deklarasi masyarakat sipil di Bali pada tanggal 10 Desember tahun 2007, *Bali Declaration : Protecting the world's forest need more than just money.*

jawab atas terjadinya pemanasan global, dengan REDD ini negara-negara maju telah berhasil membagi tanggung jawabnya terhadap terjadinya pemanasan global kepada negara-negara berkembang. Dengan REDD negara maju telah sukses menciptakan opini baru bahwa negara berkembang seperti Indonesia juga bertanggung jawab akan pemanasan global akibat tindakannya yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan.

Dengan disetujuinya REDD oleh negara-negara berkembang ini secara tidak langsung negara-negara berkembang mengakui bahwa mereka juga merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global melalui emisi karbon yang dikeluarkannya akibat adanya proses deforestasi dan degradasi hutan. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang ada di negara berkembang juga disebabkan oleh industri negara maju yang memerlukan bahan baku murah dari hutan seperti industri Pulp dan pertambangan di hutan lindung yang hampir keseluruhan dikuasai oleh perusahaan negara-negara maju.

REDD dan Konflik Kepentingan Antar Negara Annex 1

Dalam Annex 1 terdapat dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa (Inggris, Perancis, Jerman), jika dalam berbagai permasalahan lain keduanya selalu menjadi sekutu yang akrab namun dalam hal permasalahan pemanasan global ini terlihat hubungan diantara keduanya tidak menunjukkan sebagai mitra melainkan sebagai saingan. Sikap keduanya yang saling bertentangan menandai persaingan tersebut. Jika secara jelas Uni Eropa mengakui adanya bukti pemanasan global memang terjadi lain halnya dengan Amerika Serikat yang masih mempertanyakan perihal adanya dampak pemanasan global. Sikap keduanya terlihat jelas dalam

setiap perundingan UNFCCC, Uni Eropa Menjadi sangat multilateralisme dengan ikut mendukung tuntutan pihak dari negara-negara berkembang yang menginginkan adanya pemberlakuan target penurunan emisi karbon yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam Annex 1 namun sikap Amerika malah sebaliknya, mereka lebih menonjolkan sikap Unilateralismenya dan menentang adanya tuntutan target penurunan emisi karbon.

Yang menarik sebenarnya dua kekuatan tersebut baik Uni Eropa maupun Amerika Serikat adalah sama-sama negara industri maju yang memiliki tingkat emisi karbon yang sangat tinggi dan sama-sama akan mengalami kemungkinan krisis produksi pada industrinya jika benar adanya target pembatasan emisi karbon pada industrinya tetapi sikap keduanya yang berlainan dalam menanggapi isu tersebut menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan itu mungkin bisa di jawab jika kita melihat bagaimana kita memandang kondisi serta kepentingan dari keduanya. Terkait dengan hal itu kita harus tahu bagaimana sebenarnya perkembangan ekonomi dan industri di kedua pihak.

Sebelum terjadinya perang dunia pertama, negara-negara Uni Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Jerman telah menjadi negara besar hal ini dikarenakan mereka mempunyai wilayah jajahan yang luas yang bisa dieksploitasi sumberdaya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Sebelum terjadinya Revolusi Industri di daratan Eropa yang dipelopori revolusi industri di Inggris imperialisme negara-negara Eropa masih bersifat klasik yaitu hanya untuk menguasai hasil-hasil pertanian (system Kultur Stelsell) namun setelah revolusi industri terjadi ikut merubah tatanan ekonomi. Jika pada masa sebelumnya ekonomi berbasis manusia (human base)

bertransformasi kearah yang berbasiskan mesin. Pada era inilah ditandai sebagai era penggunaan bahan bakar Fosil. Seiring dengan perkembangan penggunaan mesin sebagai pengganti tenaga manusia dan hal ini mendorong menjadikan bahan bakar fosil sebagai barang bernilai ekonomi tinggi.

Hal tersebut menjadikan negara-negara eropa merubah sistem imperialsimenya bukan hanya penguasaan sumber daya pertanian tetapi menjadikannya juga sebagai imperialism berbasis energi. Dan ini mendorong mereka untuk menguasai ladang-ladang eksplorasi minyak. Sejak saat itu mulailah imperialisme berbasikan energi.

Menelisik mengenai imperialism energy di dunia, semuanya berawal dari tanah Arab. Hal ini didorong oleh ditemukannya cadangan minyak yang sangat besar dan diperkirakan jumlahnya mencapai 61,9% dari total kandungan minyak dunia. Maka tidaklah mengherankan jika banyak negara yang ingin menjajah tanah Arab untuk menguasai ladang-ladang minyaknya. Pada awalnya inggis yang memulai era imperialism energi di tanah Arab. Imperialisme ini dilakukan dengan berbagai macam cara diplomasi maupun praktek-praktek busuk dengan tujuan memperlemah kekuasaan di tanah arab dan memecah-mecah mereka menjadi beberapa negara sehingga memudahkan mereka menjajahnya.

Singkatnya setelah berhasil memecah-mecah kekuatan di Tanah Arab menjadi beberapa negara dan mendorong mereka menjadikannya sebagai negara monarki absolute. Dengan kesuksesannya tersebut maka tujuan utama dari imperialism di tanah Arab yaitu penguasaan minyak menjadi hal yang nyata. Inggris memperoleh

kesepakatan-kesepakatan eksplorasi ladang minyak, seperti kesepakatan dengan syeik di Kuwait pada tahun 1913 dan syeik Bahrain tahun 1914.

Sukses penguasaan eksploitasi minyak di tanah arab oleh Inggris terus berlanjut melalui perusahaan minyak British Petroleum (BP). Kekuksesan Inggris ini juga mendorong perancis, Belanda, Jerman, Rusia bahkan Amerika Serikat untuk ikut menguasai ladang-ladang minyak di tanah arab. Pada awalnya pengaruh Inggris di Tanah arab sangat kuat namun setelah berakhirnya perang dunia kedua yang menghancurkan ekonomi di hampir semua daratan eropa, hal ini menyebabkan mereka lebih berkonsentrasi pada masalah ekonomi dalam negerinya sehingga mereka agak melupakan kekuasannya di tanah arab demikian juga negara-negara eropa lainnya. Peristiwa ini di lihat sebagai kesempatan oleh Amerika mengambil momentum kehancuran ekonomi di eropa untuk memperkuat pengaruhnya di tanah arab dan mereka berhasil melakukannya. Sehingga pada masa itu 5 perusahaan asal Amerika yang menguasai ladang-ladang minyak di tanah Arab dan hanya mendapat 2 saingan lain yaitu BP dari Inggris dan juga Shell Petroleum yang dimiliki Belanda. Tujuh perusahaan inilah yang menguasai ladang minyak di dunia dan dikenal dengan julukan "seven sisters".

Perebutan ladang minyak di tanah arab ini sebenarnya dipengaruhi oleh adanya teori Geopolitik yang diajarkan oleh Halford Mackinder yang menyatakan siapapun yang mampu menguasai timur tengah, yang dinamainya sebagai heartland, ia akan memimpin pertarungan politik untuk menguasai imperium global. Dan benar saja teori ini terbukti setelah Amerika serikat menguasai ladang-ladang minyak di Arab mereka menjadi negara adidaya di dunia ini.

Dengan penguasaan terhadap ladang-ladang minyak di tanah arab sangat bermanfaat terhadap perkembangan industry dalam negerinya karena adanya jaminan pasokan energy yang berlebih sehingga mampu membuat amerika terus mengembangkan industrinya tanpa perlu kekhawatiran akan kekurangan pasokan energi. Hal ini menjadikan nilai lebih industri Amerika Serikat dibandingkan dengan industri didaratan eropa yang perusahaan minyaknya tidak mampu menyuplai seluruh kebutuhan industrinya sehingga masih perlu mengimpor.

Oleh karena mereka selalu mempunyai cadangan minyak yang mencukupi menjadikan Amerika sangat boros dalam hal penggunaan minyak bumi. Hal ini menjadikan mereka sebagai negara penghasil terbanyak emisi karbon akibat pembakaran minyak bumi untuk industrinya. Maka ketika adanya isu pemanasan global Amerika menjadi sasaran kritik utama sebagai negara yang paling bertanggung jawab dalam penyumbang emisi terbesar.

Dalam setiap perundingan pencegahan pemanasan global selalu saja memunculkan isu untuk mengurangi tingkat emisi karbon dari negara-negara maju. Tentu hal ini sangat ditentang oleh Amerika Serikat karena memang selama ini Amerika sangat diuntungkan dari penggunaan besar-besaran bahan bakar fosil sebab perusahaan-perusahaan eksplorasi merekalah yang banyak menguasai ladang-ladang minyak dan menjadi pemasok utama kebutuhan minyak bumi dunia. Namun sikap Uni Eropa yang berbeda, mereka lebih kooperatif terhadap isu ini dan mau menyetujui adanya target pengurangan emisi karbon negaranya. Sebenarnya status Uni Eropa pun sama dengan Amerika serikat akan dirugikan dengan adanya target

penurunan emisi ini, sebab dengan target ini bisa mengancam tingkat produksi industri dinegaranya dan hal ini bisa menimbulkan krisis ekonomi di negaranya.

Sikap Uni Eropa yang kooperatif dengan adanya target penurunan emisi karbon ini dikarenakan mereka melihatnya sebagai isu yang menguntungkan bagi mereka. Uni Eropa menyadari bahwa mereka telah kalah bersaing dengan Amerika Serikat dalam penguasaan ladang minyak, dan sebenarnya hal ini memimbulkan dendam tersendiri bagi mereka, Uni Eropa merasa tidak terima dengan kekalahan ini sebab pada awalnya merekalah yang menguasai ladang-ladang minyak yang ada di tanah Arab. Maka ketika isu target penurunan emisi karbon ini ada mereka memandangnya sebagai cara membalas kekealahannya dari Amerika Serikat. Karena logikanya dengan adanya target ini maka yang terjadi otomatis akan ada pengurangan konsumsi bahan bakar fosil guna mencapai target tersebut. Hal ini pasti akan memukul perusahaan-perusahaan eksplorasi milik Amerika Serikat. Isu ini menjadi peluang bagi mereka untuk melepaskan industri mereka dari bayang-bayang ekonomi Amerika dan menjadikan industrinya semakin mandiri.

Dengan kata lain, isu target pengurangan emisi karbon ini dipandang Uni Eropa sebagai jalan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan beralih kepada sumber energi Alternatif yang lebih ramah lingkungan. Mereka menyadari energi alternative ini belum ada yang menguasainya jadi peluang mereka sangat besar. Mereka merasa inilah saatnya untuk memulai eksploitasi sumber energi alternatif dan belajar dari pengalaman mereka tidak ingin kembali kalah lagi dengan Amerika.

Alasan utama mereka mendukung target penurunan emisi ini adalah bahwa mereka mempertimbangkan jika target ini benar dijalankan pada negara-negara

Annex 1 maka hal ini akan menjadikan persaingan antara industri dalam negerinya dengan industri Amerika semakin berimbang, sebab dengan target ini industri di Amerika harus mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, ini menyebabkan keunggulan pasokan energi minyak bumi bagi industri Amerika tidak terlampau berarti lagi, karena walaupun pasokannya berlimpah mereka tidak bisa menggunakannya secara maksimal guna mencapai target pengurangan emisi karbon.

Dengan pasokan yang berlimpah akan minyak bumi sebagai sumber energinya ini menyebabkan industri Amerika tidak terlalu memperhatikan akan efisiensi bahan bakar. Ini menjadi suatu keuntungan lagi bagi industri Eropa yang karena permasalahan keterbatasan akan pasokan energi minyak bumi menjadikan industri mereka sangat efisien dalam penggunaan minyak bumi. Maka jika target ini berlaku sebenarnya mereka lebih siap karena mereka tidak perlu secara drastis memperbarui mesin-mesin industrinya karena memang sudah efisien berbeda dengan Amerika mereka yang mesin-mesin industrinya terkenal boros akan minyak bumi tentu harus memperbaharui teknologinya agar dapat menekan penggunaan minyak bumi²⁷.

Dengan kondisi demikian Eropa memprediksikan bahwa industri mereka akan lebih cepat beradaptasi dibandingkan dengan industri Amerika Serikat. Sehingga mereka merasa yakin bahwa krisis akibat dari adanya target tersebut tidak akan

²⁷ Sebagai contoh bahwa industri Amerika lebih boros dalam penggunaan bahan bakar fosil bisa dilihat dari industri transportasinya, kendaraan-kendaraan hasil produk industri otomotif Amerika terkenal lebih boros dibanding kendaraan dari produksi negara lain. Berbeda dengan kendaraan produksi Eropa yang sudah beradaptasi lama dengan minimnya pasokan minyak menjadikan produk mereka lebih efisien. Bahkan Eropa sudah sejak lama menerapkan standard buangan emisi karbon pada setiap kendaraan yang akan beroperasi di negaranya atau yang biasa disebut dengan standard EURO 1 yang sudah berlaku sejak tahun 1991. Pengurangan dari emisi karbon dari asap kendaraan menjadi penting bagi negara maju karena transportasi mereka adalah penyumbang nomor dua emisi karbon di negaranya.

menghancurkan ekonomi dan juga produksi industrinya. Namun Amerika akan kesulitan industrinya untuk beradaptasi karena memang industri Amerika selama ini tidak mengenal adanya efisiensi bahan bakar minyak karena pasokan selalu melimpah.

Namun dengan keunggulan tersebut Uni Eropa tidak bisa dengan begitu saja yakin bahwa industrinya akan cepat beradaptasi dengan target penurunan emisi karbon tersebut, maka untuk mengantisipasi hal demikian maka mereka merancang suatu mekanisme yang dapat membantu memberi waktu agar industri mereka bisa beradaptasi dengan target tersebut. REDD adalah mekanisme yang mereka anggap cocok untuk membantu persiapan industrinya beradaptasi. Sebab dengan REDD jika mereka gagal mencapai target yang ditentukan mereka bisa melakukan cuci emisi dengan mendanai proyek REDD di negara berkembang. Mereka bisa menutupi offset karbon dalam negeri hanya dengan membayarkan uang untuk proyek REDD di negara lain.

Bahkan dengan mekanisme REDD ini Eropa akan sekali lagi diuntungkan dalam persaingan industrinya dengan Amerika Serikat sebab dengan adanya target pengurangan Emisi karbon tersebut dan dengan kondisi industri Amerika yang tidak siap industri Eropa maka tentu kemungkinan gagal mereka memenuhi target lebih besar dari kegagalan Uni Eropa dalam memenuhi targetnya, maka dengan demikian denda offset karbon yang terjadi di Amerika akan lebih besar tentunya hal ini menyebabkan mereka untuk melakukan cuci emisi dengan mekanisme REDD juga.

Dengan kondisi denda offset karbon yang lebih besar maka dana yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dalam cuci emisinya dengan REDD akan lebih besar

juga dibandingkan dengan Uni Eropa. Tentunya kondisi seperti ini akan membebani anggaran negaranya, maka otomatis pemerintah harus mencari cara untuk menutupi kebutuhan akan anggaran tersebut. Dan kemungkinan langkah yang ditempuh pemerintah Amerika adalah dengan menekan industrinya dengan memungut pajak dari bahan bakar yang mereka gunakan. Dan wacana ini memang sedang berlangsung di parlemen Amerika Serikat saat ini, parlemen Amerika sedang merancang pengenaan pajak pada bahan bakar minyak yang dijual di negaranya. Hal ini akan berdampak semakin mahalnya harga minyak di Amerika dan juga ini sekaligus akan semakin menekan dunia industrinya dan menyebabkan industrinya akan semakin kritis, tentu saja hal ini akan semakin menguntungkan bagi Uni Eropa sebab akan membuat industrinya semakin unggul dari industri Amerika.

Maka tidaklah heran jika samai dengan saat ini Amerika sangat bertentangan dengan Uni Eropa dalam memandang isu pemanasan global terutama masalah target penurunan emisi karbon bai negara negara-negara Annex 1. Isu pemanasan global ini semakin menunjukkan bahwa diantara Amerika Serikat dan Uni Eropa memang ada persaingan dalam perebutan kekuasaan ekonomi dan juga perebutan pengaruh masing-masing negara terhadap negara-negraa berkembang, ini juga tidak terlepas dari permasalahan sejarah persaingan mereka dalam perebutan sumber daya energi.

REDD dan Kepentingan Ekonomi Antara Negara Annex 1 dan Negara berkembang

Seperti diketahui dengan adanya ancaman dari isu pemanasan global menjadikan konsumen semakin kritis dalam hal produk yang ramah lingkungan, hal ini mendorong industri-industri mengikuti selera pasar membuat produk yang lebih

ramah lingkungan, bahkan isu pemanasan global ini malah mendorong terciptanya industri baru, industri Agrofuel adalah salah satunya. Industri Agrofuel adalah industri bahan bakar alternative yang berasal dari tumbuhan yang lebih ramah lingkungan. industri ini mengalami perkembangan pesat sejak gencarnya kampanye penyelamatan lingkungan dari pemanasan global.

Industri agrofuel ini mengalami puncak perkembangannya ketika pemerintah Inggris dan juga Uni Eropa ingin membuat kebijakan untuk meningkatkan penggunaan agrofuel sebagai sumber energi guna mengurangi emisi karbon. Bahkan Inggris lebih maju lagi, sejak tanggal 15 April 2008 sudah memberlakukan semua bahan bakar yang dijual di Inggris harus mengandung minimal 2,5% agrofuel dan akan menjadi naik 5% pada 2010. Sehingga tiak seorang pun di Inggris yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum yang terbebas dari Kewajiban menggunakan bahan bakar agrofuel ini. Peraturan ini disebut *Renewable Transport Fuel Obligation* (RTFO) yang merupakan peraturan yang mengadopsi peraturan pencegahan pemanasan global yang baru saja direvisi Uni Eropa.

Target bahwa agrofuel harus memiliki 10% andil dalam pasar transportasi pada tahun 2020 secara prinsip disetujui oleh para pemimpin Uni Eropa dan sudah dinyatakan dalam rancangan legislasi mengenai energi terbarukan yang diluncurkan pada tahun 2008²⁸.

Secara resmi Inggris sama halnya dengan Negara Uni Eropa lainnya harus menurunkan emisi karbonnya secara drastis. Jika selama ini pemerintah Inggris biasa dengan mudah memenuhi target pengurangan emisi bahkan diperkirakan akan mudah

²⁸ New Scienties 23 Januari 2008

melebihi dari targetnya²⁹. Namun pencapaian ini mendapat kritik karena mereka bukan disebabkan oleh pengurangan emisi karbon dalam negerinya melainkan karena pembelian kredit karbon dari luar. Maka untuk menjawab kritik tersebut RTFO diberlakukan dengan tujuan mengurangi tingkat emisi karbon pada sektor transportasi.

Dalam perkembangannya industri Agrofuel di Eropa ternyata mengalami hambatan karena adanya saingan dari industri Arofuel dari negara-negara berkembang. Industri agrofuel Eropa berbasiskan bahan baku dari kedelai, bunga biji matahari ataupun jagung kalah ekonomis dari industri Agrofuel negara berkembang yang agrofuelnya berasal dari minyak sawit Atau *Crude Palm Oil* (CPO). Selain karena tingkat produktifitasnya yang lebih tinggi namun harga CPO lebih murah dibandingkan dengan Agrofuel dari kedelai asal Uni Eropa.

Persoalan persaingan perdagangan Agrofuel menjadi semakin tidak sederhana karena pada awalnya peraturan RTFO ini ditujukan selain mengurangi emisi karbon dalam negeri tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan energi dari luar, maka kenyataan yang ada ini membuat industri Agrofuelnya kalah bersaing dengan industri agrofuel dari negara berkembang yang berbahan baku CPO ini menyebabkan banjirnya agrofuel asal negara berkembang, dikhawatirkan RTFO ini malah menjerumuskan mereka kedalam ketergantungan energi yang semakin parah³⁰.

²⁹ Dalam Protokol Kyoto Inggris diharuskan melakukan pengurangan emisi sebesar 12% pada tahun 2012 dengan acuan tingkat emisi pada tahun 1991.

³⁰ Sebagai catatan bahwa daratan Eropa tidak cocok untuk ditanami oleh Sawit maka mereka tetap harus menggunakan kedelai, biji bunga matahari dan juga jagung sebagai bahan baku agrofuelnya.

Tentu saja keadaan ini tidak dibiarkan saja oleh pemerintah di Uni Eropa. Mereka berusaha menyelamatkan industri agrofuel dalam negerinya dari persaingan dengan industri agrofuel dari negara-negara tropis penghasil agrofuel dari CPO seperti Indonesia dan Malaysia. Berbagai cara dibuat untuk menyelamatkan industri agrofuel dalam negerinya, diantaranya dengan mensubsidi dengan tujuan agar harganya bisa bersaing dengan harga agrofuel dari CPO namun hal ini tetap juga tak memecahkan masalah produktifitas yang masih kalah sehingga tetap tidak bisa bersaing dengan agrofuel CPO. Cara lain yang dilakukan adalah dengan melarang masuknya CPO kedalam negerinya tentu hal ini tidak bisa dengan seenaknya mereka lakukan karena mereka terikat dengan perjanjian perdagangan bebas WTO. Namun mereka tetap melakukannya dengan alasan bahwa CPO yang berasal dari kebun sawit di negara-negara tropis seperti Indonesia dan Malaysia menyebabkan kerusakan hutan karena lahan yang digunakan merupakan hasil dari konversi hutan lindung hal ini yang menyebabkan meningkatnya emisi karbon yang berasal dari terurainya lahan gambut dan menyebabkan pemanasan global.

Pada awalnya cara ini efektif mengurangi permintaan impor CPO ke Eropa. Namun karena memang industri Agrofuelnya tidak bisa memenuhi keseluruhan dari kebutuhan agrofuel dalam negerinya dan juga karena dimenangkannya gugatan negara-negara pemasok CPO kepada WTO sehingga Uni Eropa tidak bisa lagi melarang masuknya CPO. Namun CPO yang masuk pun harus mempunyai sertifikat bahwa CPO tersebut bukan berasal dari perkebunan sawit hasil konversi hutan lindung.

Namun Uni Eropa tidak menyerah dalam menyelamatkan industri agrofuelnya sebab saat ini industri ini telah menjadi industri vital karena berkaitan dengan pasokan energi dalam negeri. Hal ini direspon Inggris dengan mengambil langkah cepat mendirikan Kantor Perubahan Iklim untuk mengembangkan kebijakan dan strategi perubahan iklim secara domestik maupun internasional. Kantor ini juga menjadi rumah bagi tim Stern Review.

Melalui lembaga tersebutlah dicurigai yang menciptakan skema REDD dan melakukan lobi-lobi terhadap negara-negara berkembang untuk menyetujui skema tersebut. Mereka menciptakan Skema REDD ini sebenarnya bisa dilihat bukan sekedar untuk tujuan pencegahan pemanasan global melainkan isu tersebut hanya dijadikan isu pengalihan untuk membungkus isu yang sebenarnya yaitu mencegah perkembangan industri Agrofuel CPO dari negara-negara tropis sehingga mereka dapat menyelamatkan industri Agrofuel dalam negerinya.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa usaha Uni Eropa dalam menyelamatkan industri agrofuel dalam negerinya dengan cara memberi subsidi dan memboikot impor CPO ternyata tidak efektif sehingga mereka menciptakan skema REDD. Setelah jalan proteksi dirasa mereka gagal maka mengalihkan caranya dengan menyerang langsung terhadap pada industri CPO negara-negara tropis dengan cara melarang mereka secara halus untuk tidak membuka hutan mereka untuk dikonversi menjadi perkebunan sawit dengan alasan bahwa akan diberi kompensasi jika mereka tetap melestarikan hutannya.

Dengan skema REDD ini negara-negara Annex 1 paling tidak memperoleh dua keuntungan sekaligus. Pertama dengan REDD mereka bisa melakukan cuci emisi

dengan membeli kredit karbon sehingga industri mereka tetap bisa beroperasi tanpa perlu memikirkan mengurangi emisi karbon buangnya. Kedua dengan REDD mereka bisa menekan perkembangan industri Agrofuel CPO asal negara-negara berkembang sehingga negara-negara berkembang itu tidak bisa mengekspansi kebun sawitnya sekaligus hal ini memberikan kesempatan lebih besar lagi terhadap persaingan pasar oleh Agrofuel dalam negerinya.

Penggunaan Isu Pemanasan Global sebagai Alat Membentuk Pemerintahan Satu Dunia dan Pertarungan ideologi Marxisme dan Neoliberalisme.

Beragam spekulasi yang meliputi permasalahan pemanasan global salah satunya adalah isu mengenai adanya pertarungan ideologi Marxisme dan Neoliberalisme. Belakangan isu pertarungan ideologi Marxisme dan Neoliberalisme semakin memanas setelah adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Lord Christopher Monckton, ia merupakan peasehat sains pada era pemerintahan Perdana Menteri Margaret Thatcher di Inggris³¹.

Pada tanggal 15 Oktober 2009 di Bethel University, St. Paul, Minnesota, Monckton mengatakan bahwa tujuan utama konferensi PBB mengenai perubahan iklim yang diselenggarakan di Konpenhagen adalah untuk menggunakan isu pemanasan global sebagai fondasi untuk membangun satu pemerintahan dunia. Monckton menjelaskan lebih lanjut bahwa isu pemanasan global hanyalah sebuah kepalsuan. Ia bahkan menyebut apa yang di ungkapkan Al Gore dalam karyanya *An*

³¹ <http://www.Eutimes.net/2009/10/lord-chistoper-monckton-speaking-at-bethel-university-about-the-upcoming-world-governance/>

Inconvenient Truth sengaja dibuat untuk membangkitkan semangat kebersamaan dari seluruh negara untuk bersatu memerangi pemanasan global.

Monckton juga menyebutkan bahwa isu pembentukan pemerintahan satu dunia ini adalah satu dari tiga tujuan entitas yang baru. Tujuan keduanya adalah untuk mentransfer kekayaan negara maju ke negara-negara dunia ketiga untuk memenuhi apa yang disebut dengan “hutang iklim” karena dunia barat telah membakar CO₂ sedangkan negara dunia ketiga tidak melakukannya. Karena negara maju telah mengacaukan iklim dan mereka tidak. Dan tujuan ketiga dari entitas baru ini adalah pemaksaan penyelenggaraan negara olehnya, ia menyoroti adanya gerakan yang dilakukan untuk memaksa negara-negara maju untuk mentransfer sebagian kekayaannya kepada negara dunia ketiga.

Bagi Monckton isu pemanasan global ini merupakan alat ideology yang digunakan politisi sayap kiri Uni Eropa untuk memaksakan pajak global dan membangun satu pemerintahan dunia yang dikendalikan oleh PBB. Monckton lebih lanjut menjelaskan bahwa transfer kekayaan dari negara barat ke negara-negara dunia ketiga lebih mirip dengan teori Marxisme dibandingkan keadilan iklim.

Memang benar apa yang disebutkan oleh Monckton bahwa isu pemanasan global terkait kewajiban negara maju untuk memberikan bantuan finansial pada negara-negara berkembang mirip dengan teori Marxisme terutama apa yang disebut dengan teori nilai lebih dalam Marxisme dan isu pemerintahan satu dunia sama dengan sosialisme dunianya Marxisme. Namun apa yang dijelaskan Monckton semakin mempertegas adanya persaingan ideologi antara Marxisme dengan Neoliberalisme.

Seperti yang telah disebutkan bahwa Monckton adalah mantan penasihat sains pada pemerintahan Perdana Menteri Margaret Thatcher, pada pemerintahan Thatcher inilah awal perkembangan Neoliberalisme, jadi bukan tidak mungkin bahwa apa yang disuarakan oleh Monckton adalah perwakilan suara dari kaum Neoliberalisme. Mengapa kaum Neoliberal sangat menentang beragam mekanisme pencegahan pemanasan global terutamanya mengenai adanya kewajiban negara-negara maju untuk melakukan transfer finansial kepada negara-negara berkembang karena ini bertentangan dengan prinsip Neoliberal yang anti pada subsidi karena akan memberatkan anggaran negara.

Kaum Neoliberal yang menuding kaum Marxisme yang berada dibalik isu pemanasan global dan sangat menentang setiap gagasan yang mengharuskan negara maju bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Sebenarnya hal ini terjadi karena antara kaum Neoliberalisme dan Marxisme mempunyai tujuan yang sama namun berbeda prinsip. Jika kaum Neoliberalisme menuding kaum Marxisme menggunakan isu pemanasan global untuk membentuk pemerintahan satu dunia, sesungguhnya kaum Neoliberalisme juga mempunyai agenda yang sama yaitu membentuk pemerintahan satu dunia atau yang biasa mereka sebut sebagai *Global Governance*. Namun pemerintahan satu dunia Marxisme berbeda dengan Neoliberalisme, pemerintahan satu dunia versi Neoliberalisme bukan bertujuan untuk keadilan iklim melainkan untuk pasar bebas.

Global Governance Neoliberalisme ini diprakasi oleh lembaga World Trade Organization (WTO) yang mereka bentuk. Melalui WTO inilah kaum Neoliberalisme menyebarkan ideologinya kepada negara-negara berkembang untuk mengikuti

mekanisme pasar bebas. Jika kaum Neoliberalisme menggunakan WTO untuk mewujudkan cita-citanya tentang global governance sedangkan kaum Marxisme lebih memainkan perannya pada UNFCCC dalam mewujudkan pemerintahan satu dunianya.

Maka tidaklah heran jika terjadi pertentangan antara kaum Neoliberalisme dan kaum Marxisme dalam memandang isu pemanasan global, kedua ideologi ini mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Bukan tidak mungkin bahwa REDD yang merupakan salah satu mekanisme pencegahan pemanasan global dijadikan alat bagi kaum Marxisme untuk mengusahakan Transfer kekayaan kenegara berkembang dari negara maju, sehingga kaum neoliberalisme menyerukan untuk menolak mekanisme REDD ini.

3. Pemerintah Indonesia

Jika berbicara mengenai program REDD ini tentu yang pertama kita lihat adalah peran pemerintah Indonesia adalah sebagai negara tuan rumah penyelenggara konferensi CoP ke 13 UNFCCC yang berlangsung di Bali. Melalui CoP inilah dicapai kesepakatan mengenai program REDD sebagai salah satu solusi mengurangi atau mengatasi pemanasan global yang sedang yang diyakini sedang terjadi.

Tentunya dalam kaitannya dengan Program REDD ini peran pemerintah Indonesia bukan hanya sekedar itu saja. Dan dalam penelitian ini ditemukan data lain yang menunjukkan adanya peran lebih yang dimainkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu yang paling menonjol adalah pemerintah Indonesia yang menyodorkan program REDD pada CoP tersebut, pemerintah Indonesia berujar REDD ini adalah atas dasar inisiatif Indonesia dalam merancang program pencegahan pemanasan

global. Klaim ini sering disampaikan pihak pemerintah setiap ada kesempatan. Hal ini bisa jadi dikarenakan keinginan pemerintah Indonesia yang ingin lebih tampil lagi dalam setiap perundingan iklim global sekaligus menjawab semua kritik yang di tujukan pada Indonesia terkait permasalahan kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan.

a. Inisiator REDD pada CoP ke 13

Pemerintah Indonesia berargumen bahwa REDD ini adalah hasil sumbangan pemikiran bangsa Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap pemanasan global. Bahwa menurut pemerintah REDD ini di hasilkan oleh Lembaga yang didirikan pemerintah Indonesia yaitu IFCA (Indonesian Forest Climate Alliance). Aliansi ini merupakan suatu forum komunikasi, koordinasi, dan konsultasi bagi sekelompok ahli yang bergerak di bidang kehutanan dan perubahan iklim di Indonesia, terutama untuk menganalisa praktek skema REDD di Indonesia. IFCA beranggotakan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga-lembaga saintifik dan mitra internasional yang dikoordinatori oleh Departemen Kehutanan.

Dari penelitian IFCA inilah yang menghasilkan salah satu penanggulangan pemanasan global yang kemudian dinamakan program REDD. Dan hasil penelitian IFCA ini yang ditawarkan pemerintah Indonesia pada saat CoP ke 13 dan menjadi seperti sikap Indonesia dalam konfensi tersebut.

Namun jika pemerintah Indonesia boleh bangga mengklaim merekalah sebagai inisiator program REDD tetapi dalam penelitian ini di temukan bukti lain yang berlawanan dari apa yang diyakini pemerintah Indonesia. Ada keraguan bahwa REDD ini merupakan hasil murni pemikiran Indonesia dalam mengatasi pemanasan

global. Memang benar pemerintah Indonesia lah yang mengajukan proposal REDD ini pada CoP ke 13 tapi apakah proposal ini memang berdasarkan murni dari kepedulian pemerintah Indonesia dan juga apakah benar bahwa Indonesia lah yang pertama kali mencetuskan program REDD ini.

Keraguan akan asal usul dari siapa yang merancang REDD ini sangat penting untuk di ketahui lebih lanjut sebab jika ini di ketahui maka sedikitnya bisa menjawab apakah REDD ini benar-benar mewakili kepentingan negara insiatornya. Bahwa Indonesia yang mengklaim REDD ini hasil sumbangsih bangsa Indonesia maka jika hal ini benar maka bisa menjawab keraguan negara-negara lain yang merasa dirinya dalam posisi yang sama dengan Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki hutan tidak di rugikan dengan skema REDD ini.

Tetapi kenyatannya menunjukkan adanya penolakan terhadap REDD sendiri dari negara-negara berkembang yang memiliki hutan seperti Indonesia. Negara-negara lain mencurigai bahwa REDD ini hanya akan menimbulkan masalah baru lagi bagi negara-negara berkembang dan REDD juga dinilai hanya kan menguntungkan negara-negara maju. Namun demikian pada saat CoP ke 13 di Bali tetap juga disepakati bersama menjadi salah satu butir kesepakatan Bali Roadmap sebab selain adanya dukungan negara maju juga adanya kekhawatiran negara-negara peserta jika dalam pertemuan Bali tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa akan berdampak pada kelangsungan kesepakatan Protokol Kyoto yang akan segera berakhir masanya.

Setelah CoP ke 13 berakhir maka timbul banyak pertanyaan mengenai REDD ini sendiri. Sebenarnya permasalahan pencegahan pemanasan global melalui tindakan

penyelamatan hutan dari deforestasi bukan Indonesia lah yang pertama kali membicarakan ini. Tercatat bahwa sebenarnya permasalahan *reducing emission from deforestasi* (RED) sudah lebih dahulu di usung oleh Papua Nuginia dan Costa Rika yang didukung oleh delapan pihak yang tergabung *Coalition for Rainforest Nations* (CfRN) pada CoP ke 11 di Montreal Kanada³².

Sebenarnya pemerintah Indonesia sejak awal tidak mempunyai solusi apa pun dalam kaitanya dengan hutan sebagai pencegah pemanasan global. Pemerintah Indonesia baru mulai serius menanggapi masalah ini ketika banyak negara yang mengecam ketidak tegasan sikap Indonesia dalam pencegahan pemanasan global padahal Indonesia di tuduh sebagai salahsatu negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia yang berasal dari kebakaran hutan dan deforestasi.

Keseriusan pemerintah Indonesia baru terlihat ketika Indonesia ditunjuk sebagai negara penyelenggara CoP ke 13. Pemerintah Indonesia yang tidak mau di labeli sebagai negara yang tidak peduli masalah pemanasan global mulai menyusun langkah agar pada saat CoP ke 13 pemerintah Indonesia mampu memainkan perannya lagi. Maka dengan segeralah Indonesia membentuk IFCA tersebut. Dan dari pembentuka IFCA inilah sebenarnya membuktikan bahwa sejak awal Indonesia tidak mempunyai mekanisme apapun dalam pencegahan pemanasan global ini.

Dan ketidak siapan inilah yang ditangkap oleh negara-negara maju sebagai kesempatan untuk mencoba mempengaruhi pemerintah Indonesia. Sadar akan ketidak siapanya pemerintah dengan senang hati menerima tawaran bantuan dari negara maju

³² <http://antaranews.com/berita/1259426853/redd-antara-penurunan-emisi-dan-pemberdayaan-masyarakat> diunduh pada tanggal 30 November 2009

dalam membantu Indonesia merumuskan langkah apa yang akan ditawarkan, pemerintah negara-negara maju tersebut selain memberikan bantuan dana tetapi juga mengirimkan para penelitiannya ikut bergabung dengan para peneliti dari Indonesia. Tentunya pemerintah Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari negara-negara maju ini karena selain karena kekurangan dana tetapi juga kekurangan sumberdaya manusia yang mampu merumuskan mekanisme apa yang nanti akan ditawarkan di CoP 13. Selain itu memang sudah menjadi tekad dari pemerintah Indonesia karena didorong oleh rasa malu jika tidak mempunyai sikap apa pun yang mampu ditawarkan dalam CoP nantinya.

Dengan menerima bantuan dari negara asing pada IFCA inilah kesalahan fatal dari pemerintah Indonesia. Sudah pasti peneliti-peneliti asing yang diperbantukan akan mewakili kepentingan negaranya masing masing. Maka jika sudah demikian diragukan hasil yang akan di buat IFCA mampu mewakili kepentingan dalam negeri.

Kembali ke REDD yang merupakan hasil dari mekanisme pencegahan pemanasan global yang di rancang oleh IFCA ini, REDD sebenarnya makin mempertegas bahwa sebenarnya sejak awal pemerintah Indonesia tidak mempunyai pandangan apa pun mengenai masalah kehutanan dalam pencegahan pemanasan global. Dengan mengamati mekanisme REDD yang ditawarkan pemerintah saja kita bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya IFCA hanya mengadopsi-adopsi mekanisme *reducing emission from deforestasi* yang ditawarkan oleh negara-negara lain lalu di jadikan satu mekanisme utuh REDD yang kita kenal saat ini. Untuk membedakannya dengan mekanisme lain yang pernah ditawarkan oleh negara lain maka diperluaslah bukan hanya Deforestasi tetapi juga degradasi hutan, yang

sebenarnya bukan tidak terfikir oleh negara lain untuk mencantumkan degradasi hutan sebagai poin yang ditawarkan tetapi dengan dimasukkannya deforestasi saja mereka akan sulit mengukur secara riil tingkatan deforestasi apa lagi degradasi hutan karena belum ada teknologi yang bisa mengukur degradasi hutan. Tetapi IFCA tentu tidak akan dianggap berhasil jika hanya menawarkan deforestasi saja karena itu sama saja dengan mengadopsi langsung program orang lain maka demi menghilangkan kesan itu maka IFCA memaksakan degradasi hutan kedalam program yang diusulkannya.

Lalu mengenai apakah REDD yang dihasilkan oleh IFCA ini mencerminkan kepentingan dalam negeri Indonesia ternyata pada perkembangannya nanti banyak hal yang menunjukkan bahwa REDD sangat bertabrakan dengan program pemerintah lainnya, hal ini di jelaskan lebih lanjut pada Bab berikutnya.

Selain keberadaan peneliti-peneliti asing pada IFCA ada bukti lain bagaimana sebenarnya bahwa REDD merupakan isu titipan dari negara-negara maju. Salah satunya adalah kedatangan mantan ekonom kepala Bank Dunia, Sir Nicholas Stern yang di tugaskan oleh Kementerian Keuangan Inggris Raya ke Indonesia. Kunjungan Stern ke Indonesia bertemu dengan Presiden dan juga DPR selama empat hari pada akhir Maret 2007 adalah untuk memastikan bahwa perubahan iklim telah benar diletakan pada tempat yang semestinya dalam agenda politik pemerintahan Indonesia.

Seperti diketahui Sir Nicholas Stern pernah meluncurkan laporan The Stern Review on Climate Change pada bulan Oktober 2006 yang isinya menyerukan pada dunia adanya potensi hutan untuk mitigasi pemanasan global dan dalam laporannya ia

mengusulkan bahwa pencegahan deforestasi harus menjadi bagian dari setiap perjanjian iklim paska Protokol Kyoto dan skema percontohan harus segera dimulai.

b. Pemerintah Daerah dan Kesepakatan REDD

Selain Pemerintah Pusat ternyata Pemerintah Daerah juga memiliki peran penting juga dalam REDD ini. Peran Pemerintah Daerah ini tidak bisa dipandang sebelah mata, biasanya dalam urusan konferensi-konferensi tingkat dunia Pemerintah Daerah tidak memiliki peranan yang besar dalam penentuan keputusan. Tetapi pada kasus CoP ke 13 ada sebuah gerakan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menekan Pemerintah pusat.

Pada saat CoP ke 13 berlangsung di Bali ikut juga di hadiri oleh tiga gubernur yaitu Gubernur provinsi Nangroe Aceh Dasussallam, Papua dan Papua Barat. Ketiga gubernur tersebut bukan tanpa alasan hadir dalam CoP ke 13, mereka sebenarnya memiliki kepentingan besar dalam CoP tersebut. Ketiga gubernur tersebut sejak awal datang dengan maksud dan tujuan mendukung inisiatif REDD yang hendak di tawarkan pemerintah pusat dalam CoP tersebut.

Ketiga gubernur tersebut memang sangat mendukung mekanisme REDD sebab sebelumnya mereka telah menandatangani pemberian hak eksklusif terhadap perusahaan asal Australia yaitu Carbon Conservation dan bahkan telah menunjuk CEO Carbon Conservation Dorjee Sun sebagai juru lobi internasional yang menawarkan kredit karbon hutan-hutan Indonesia³³. Tentunya kehadiran mereka

³³ *REDD Solusi Palsu Atasi Perubahan Iklim*, <http://www.vhrmedia.com/vhr-REDD/bingkai.html> diunduh tanggal 16 Mei 2009.

dalam CoP sangat penting setidaknya memberikan dukungan kepada pemerintah agar mekanisme REDD benar-benar di sepakati.

Dengan adanya kesepakatan antara ketiga pemerintah daerah tersebut dengan Carbon Conservation maka semakin mempertegas bahwa begitu besarnya campur tangan asing dalam persetujuan REDD ini. Kesepakatan dengan Carbon Conservation ini juga membuktikan bagaimana negara-negara maju sangat rapi dalam mengiring Indonesia kedalam kesepakatan REDD.

c. Kepentingan Indonesia Terhadap Mekanisme REDD

Dari pemaparan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kepentingan-kepentingan apa saja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Berikut adalah kepentingan-kepentingannya:

1. Dengan REDD Indonesia bisa menjawab kritik dunia terhadap persoalan emisi karbon dari kebakaran hutan dan pembukaan hutan sekaligus demi mengurangi emisi karbon dan juga mengatasi permasalahan pemanasan global
2. Pemerintah Indonesia berharap kana adanya dana kompensasi atas tindakannya menyelamatkan hutan Indonesia
3. Mekanisme REDD dipandang pemerintah Indonesia bisa memberikan kemajuan ilmu pengetahuan dan transfer teknologi dari negara maju ke Indonesia

4. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non Government Organizations

Menjadi suatu yang penting dalam kaitannya dengan REDD atau pun masalah lingkungan lainnya untuk melihat bagaimana peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Government Organizations* (NGO) dalam perannya dalam

penentuan kebijakan. Bahkan dalam permasalahan REDD sendiri LSM-LSM terutama yang bergelut dalam hal kehutanan sangat besar menaruh perhatiannya. Dan ini menunjukkan bagaimana sebenarnya permasalahan REDD ini adalah sangat serius.

Seperti diketahui bahwa kekuatan LSM adalah karakter pada moralnya yang kuat dan keinginan untuk mempengaruhi pelaku langsung pelaku atas kerusakan lingkungan. Kekuatan LSM dapat dibagi dalam dua macam : (1) ketika LSM mencari pengaruh politik melalui usaha untuk mempengaruhi kebijakan lingkungan oleh praktik-praktik negara, pengusaha swasta dan lembaga internasional. (2) ketika LSM mencari pengaruh politik melalui kampanye publisitas yang baik di media seperti koran, majalah dan televisi yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik akan masalah lingkungan.³⁴

Dalam permasalahan REDD ini maka LSM atau NGO's bisa di klasifikasikan menjadi 2 jenis LSM, yaitu LSM yang mendukung sepenuhnya pelaksanaan Program REDD lalu LSM yang mengkritisi kehadiran program REDD. Tentunya dari kedua sikap LSM tersebut bukan tanpa adanya kepentingan tersendiri dari LSM-LSM tersebut terhadap keberadaan program REDD. Mereka saling memberikan argumen masing-masing dalam sikapnya terhadap REDD.

Ada beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil sikapnya untuk mendukung atau pun menolak REDD. Dari sekian banyak LSM lingkungan yang ikut ambil bagian dalam keterkaitannya dengan program REDD tetapi dalam penelitian kali ini hanya akan mengambil 2 contoh LSM saja

³⁴ Herman Hidayat, *op.cit*, hal 20 dikutip dari R. Bryant dan Bailey, *Third World Political Ecology*, London : Routledge Press, 1996, hal. 130-132.

yang keduanya dirasa peneliti mewakili 2 kelompok LSM yang mendukung dan yang menolak program REDD. Pengambilan 2 LSM ini bukan bermaksud meniadakan atau pun mengecilkan peran dari LSM lainnya dalam keterkaitannya dalam Program REDD tetapi semata-mata hanya untuk mempermudah penelitian ini.

Dua LSM yang diambil sebagai contoh adalah Center for International Forestry Research (CIFOR) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). CIFOR dipilih untuk mewakili LSM yang mendukung REDD sedangkan WALHI dipilih sebagai LSM yang mengkritisi atau menolak keberadaan REDD.

a. LSM Pendukung REDD

Pemilihan CIFOR yang diangkat sebagai contoh LSM yang mendukung REDD didasari bahwa memang CIFOR telah sejak awal ikut ambil bagian dalam IFCA, yaitu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengkaji masalah pemanasan global dan mencari cara untuk mengatasi permasalahan pemanasan global tersebut. CIFOR banyak mengirimkan ahlinya dalam IFCA tersebut³⁵. Seperti diketahui bahwa IFCA lah yang memberikan saran kepada pemerintah untuk mengajukan REDD sebagai program yang ditawarkan pada CoP 13 di Bali dalam mengatasi pemanasan global³⁶.

Keterlibatan CIFOR dalam IFCA ini menjadikan CIFOR sebagai salah satu lembaga perancang lahirnya REDD. Apa lagi dengan keterlibatannya di IFCA jelas bahwa CIFOR memiliki sumbangsih pemikiran yang tidak sedikit dalam program

³⁵ Tercatat ada beberapa nama ahli yang berasal dari CIFOR yang bekerja di IFCA diantaranya adalah: Markku Kaninen, Prof. Daniel Murdiyarso, Bambang Setiono dan Krystof Obidzinsky.

³⁶ *Laporan Konsolidasi IFCA: Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (Dephut, 2008)* dapat diakses melalui website www.forda-mof.org.

REDD tersebut. Bahkan jika dilihat dalam komposisi pengorganisasian para peneliti yang ditempatkan hampir disemua bidang studi di IFCA, para peneliti CIFOR tersebar merata di setiap bidang studi IFCA. Sudah pastinya secara otomatis keterlibatannya dalam IFCA menjadikan CIFOR sebagai LSM yang mendukung penuh REDD.

Tentunya keberadaan CIFOR dalam IFCA ini bukan tanpa tujuan, dapat dipastikan bahwa CIFOR membawa setidaknya agenda atau program kerja mereka kedalam setiap kebijakan yang di ambil dalam IFCA. Dengan kata lain bahwa CIFOR dalam kesertaanya di IFCA memiliki kepentingan tersendiri yang hendak ia capai.

Kepentingan CIFOR dalam Mekanisme REDD

Kepentingan CIFOR dalam mekanisme REDD ini bisa dilihat dengan mudah jika mengetahui sumber pendanaan yang selama ini membiayai operasionalnya, CIFOR merupakan suatu organisasi internasional Non pemerintah yang memiliki jaringan kerja di lebih 30 negara dan mempunyai hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor internasional dan lembaga bantuan dari negara maju yang mendanai program-program mereka seperti AUSAID, USAID, World Bank dan banyak lagi. Maka melihat kondisi ini bukan tidak mungkin bahwa CIFOR merupakan LSM yang didirikan untuk menyukseskan misi-misi dari negara-negara maju.

Tentu pantas dicurigai CIFOR ini merupakan perpanjangan tangan dari negara maju dalam mengarahkan kebijakan nasional Indonesia terkait dengan masalah penanggulangan pemanasan global. Apalagi CIFOR sendiri mempunyai beberapa tenaga ahli yang berasal dari luar negeri.

Maka dapat disimpulkan bahwa apa saja yang menjadi kepentingan CIFOR dalam REDD ini, diantaranya adalah:

Pertama, CIFOR berada dalam IFCA merupakan LSM titipan asing yang ditugasi mengarahkan agar skema REDD disetujui oleh pemerintah Indonesia,

Kedua, CIFOR berupaya meyakinkan Indonesia untuk membiarkan REDD masuk dalam skema pasar bebas,

Ketiga, CIFOR memiliki kepentingan agar LSM seperti mereka bisa menjadi pelaksana proyek REDD sehingga pada nantinya mereka bisa menjadi broker perdagangan karbon dan mendapat dana dari hasil menjual karbon tersebut.

Namun semua kepentingan itu dibungkus sebagai isu penyelamatan lingkungan dari pemanasan global.

b. LSM PENOLAK REDD

Sebenarnya dalam penelitian kali ini tidak mendapatkan adanya LSM yang benar-benar yang melakukan penolakan program REDD, Ini juga yang ditangkap dalam sikap WALHI dalam menanggapi REDD. Memang benar pada awal-awal peluncuran REDD sikap WALHI sangat keras menolak REDD tersebut. Namun belakangan di beberapa kesempatan wawancara dengan media ataupun dari publikasinya sendiri WALHI tidak benar-benar menolak adanya REDD.

WALHI sebenarnya bukan juga menerima secara utuh program REDD tersebut, tetapi memberikan beberapa catatan negative dari REDD tersebut. Mungkin bahasa yang lebih tepat dalam menggambarkan sikap WALHI ini adalah sikap mengkritisi.

Beberapa hal yang diberi catatan negative oleh WALHI adalah mekanisme pasar yang akan diberlakukan dalam skema REDD, dengan mengacu pada skema pasar bebas maka menurut pandangan mereka hanya akan merugikan negara-negara pemilik hutan saja, mereka beralasan mekanisme pasar bebas dalam REDD akan sama nasibnya dengan komoditas lain yang diperdagangkan bebas yang pada akhirnya akan dimonopoli oleh negara-negara maju saja, sebab yang menjadi konsumennya hanya negara maju saja yang jumlahnya sedikit dibandingkan negara yang akan ikut dalam program REDD hal ini bisa membuat mereka akan mudah mengontrol harga karbon yang diperjual belikan.

Hal lain yang menjadi kekhawatiran WALHI adalah bahwa dalam pelaksanaannya hanya akan menguntungkan broker-broker perusahaan karbon dikarenakan tidak adanya mekanisme yang jelas dalam melindungi masyarakat pemilik hutan dari negoisasi pembagian hasil penjualan karbon dan bukan tidak mungkin masyarakat hutan adat akan dikelabui oleh para ahli-ahli dari perusahaan broker tersebut.

Selain itu juga adanya kekhawatiran dari WALHI bahwa REDD bisa menyebabkan hilangnya akses kontrol masyarakat komunitas lokal dari sumber-sumber kehidupannya karena selama ini memang dalam setiap perundingan mengenai REDD masyarakat hutan adat sangat jarang diikuti sertakan.

Namun yang menjadi faktor utama dari penolakan WALHI adalah komitmen WALHI yang tidak akan pernah bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor seperti Bank Dunia maupun IMF, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa REDD sarat

akan kepentingan dari Bank Dunia. Mereka beranggapan Bank Dunia tidak layak ikut dalam program penyelamatan lingkungan sebab menurut mereka Bank Dunia lah yang harusnya ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang dialami dunia karena mereka yang memberika dana untuk program-program pembanguna yang tidak ramah lingkungan.